

ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN JENEPONTO

Choiroel Woestho

Email : choiroel@dsn.ubharajaya.ac.id

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Jl. Harsono RM No. 67, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Ari Sulistyowati

Email : ari.sulistyowati@dsn.ubharajaya.ac.id

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Jl. Harsono RM No. 67, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Rycha Kuwara Sari

Email : rycha@dsn.ubharajaya.ac.id

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Jl. Harsono RM No. 67, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

ABSTRAK

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah memerlukan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis *money follow function*. Hal tersebut merupakan cerminan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menunjang keberhasilan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan buat mengetahui rasio kemandirian keuangan wilayah serta rasio kemampuan keuangan daerah dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto selama rentang tahun 2000 – 2019. Analisis data menggunakan dua jenis. Pertama, melihat rasio kemandirian keuangan daerah, rasio kemampuan keuangan daerah, kedua melihat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh adalah, rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah sekali dengan rentang 0% - 25% dengan pola hubungan instruktif. Sementara hasil rasio kemampuan keuangan daerah masih sangat kecil dengan rentang 0% - 10%. Untuk hasil regresi linier berganda, baik uji-t dan uji F, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio kemampuan keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : Kemampuan Keuangan Daerah; Kemandirian Keuangan Daerah; Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

Development carried out by local governments requires a money-based planning and budgeting process to follow functions. This is a reflection of the effectiveness of regional financial management so that it can support the success of regional autonomy. This study aims to determine the ratio of regional financial independence and the ratio of regional financial capacity and how it affects economic growth in Jeneponto Regency during the period 2000 - 2019. Data analysis used two types. First, look at the ratio of regional financial independence, the ratio of regional financial capacity, secondly, look at the effect of the ratio of regional financial independence and the ratio of regional financial capacity to economic growth using multiple linear regression. The results obtained are, the ratio of regional financial independence is still very low with a range of 0% - 25%

with a pattern of instructive relationships. Meanwhile the results of the ratio of regional financial capacity are still very small with a range of 0% - 10%. For the results of multiple linear regression, both the t-test and the F test, the ratio of regional financial independence and the ratio of regional financial capacity has an influence on economic growth.

Keywords: Regional Financial Capability; Regional Financial Independence; Economic growth

PENDAHULUAN

Otonomi daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk menata manajemen pemerintahan daerah agar lebih responsive, akuntabel, transparan serta efisien dengan mengedepankan kondisi dan kemampuan daerah serta memaksimalkan fungsi pemerintahan yang dilakukan secara cepat, dekat dan tepat dengan kebutuhan masyarakat.

(Gousario & Dharmastuti, 2015) menyatakan bahwa otonomi daerah tidak hanya untuk menghilangkan disintegrasi bangsa, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan manajemen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat

Otonomi daerah di Indonesia juga dipandang sebagai strategi untuk menjawab tuntutan masyarakat lokal terhadap tiga isu utama pembangunan yaitu pembagian kekuasaan, distribusi pendapatan, dan kemandirian sistem manajemen (Paul et al., 2012)

Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur tentang desentralisasi. desentralisasi berupa alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial. Penerapan Desentralisasi terutama terdiri dari pembagian fungsi / tugas / wewenang antar tingkat pemerintahan (Nurhemi & Suryani, 2015).

Desentralisasi fiskal adalah salah satu konsep kunci dalam teori keuangan publik dan ukuran kebijakan yang umum digunakan dalam reformasi sektor publik. Di negara bagian federal, desentralisasi fiskal berarti bahwa pendapatan dan tanggung jawab pengeluaran (hak untuk mengenakan dan memungut pajak dan secara mandiri menentukan area fokus pengeluaran) dialihkan dari federal ke tingkat regional dan lokal (Yushkov, 2016).

Secara umum, kebijakan desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memecahkan masalah kurangnya pendapatan, mengatasi eksternalitas dan redistribusi pendapatan nasional serta menstabilkan makro ekonomi (Suwandi & Warokka, 2013).

Untuk melihat kemampuan daerah dalam melakukan tugas otonomi daerah, dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah dari segi keuangan adalah instrument utama bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran pendapatan serta pengeluaran sehingga dapat digunakan sebagai pengambil keputusan untuk perencanaan pembangunan.

Mengetahui apakah daerah dapat melaksanakan pembangunan dengan responsive, akuntabel, transparan serta efisien tercermin dari kinerja daerah mengelola APBD-nya. Menurut (Royda & Riana, 2019) pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Meski begitu, (Raza et al., 2018) tidak ada perbedaan terhadap rata – rata otonomi daerah dalam hal proporsi pendapatan daerah, kinerja penganggaran serta pertumbuhan daerah. Berkenaan dengan hal keuangan, berarti tidak ada perbedaan derajat kemandirian dalam otonomi daerah.

Kabupaten Jeneponto dalam data APBD mengalami kenaikan selama tahun 2013 hingga tahun 2019, seperti yang tercantum pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 - 2019

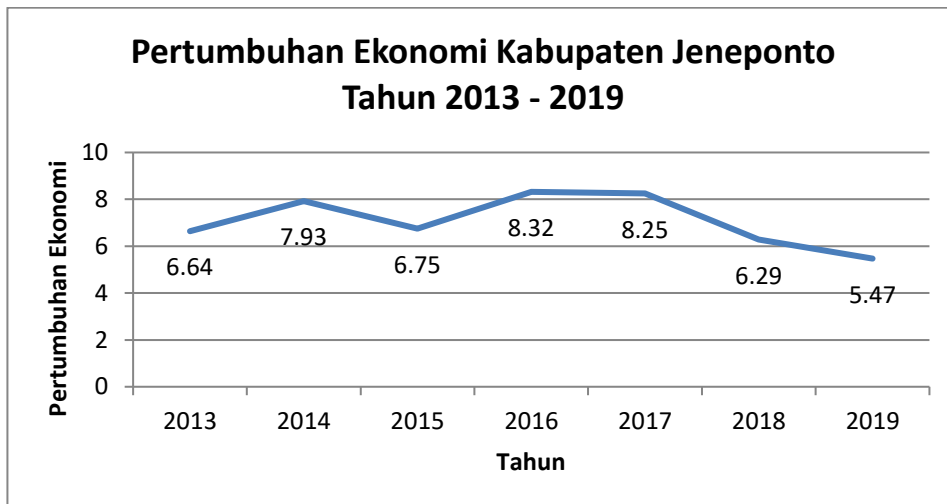
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan	721.991	804.412	1.044.672	1.261.885	1.088.513	1.211.362	1.402.923
1. Pendapatan Asli Daerah	16.617	46.032	61.267	77.638	97.930	91.994	140.833
2. Dana Perimbangan	599.354	637.516	788.961	970.730	870.000	941.044	1.049.790
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	106.020	120.863	194.443	213.515	120.583	178.323	212.299
Belanja	708.318	794.224	1.016.032	1.245.329	1.136.700	1.186.291	1.402.923
1. Belanja Tidak Langsung	452.540	435.630	504.704	596.537	607.066	700.529	735.814
2. Belanja Langsung	255.777	358.594	511.327	648.791	529.633	485.761	667.108

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Dari data tersebut dapat diketahui antara tahun 2013 hingga tahun 2019 terjadi kenaikan pendapatan dengan rata – rata 12,98%. Kenaikan tertinggi terdapat pada komponen Dana Perimbangan. Begitu juga dengan belanja daerah mengalami kenaikan

dengan rata – rata 14,53% dengan belanja tidak langsung merupakan kenaikan paling tinggi dalam komponen belanja daerah.

Dari data tersebut menandakan bahwa pembangunan daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga perlu meningkatkan pengeluaran pemerintah. Untuk dapat memenuhi pengeluaran pemerintah, maka daerah perlu menggunakan potensi daerah yang tersedia dengan tidak mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 - 2019

Dari gambar 1, dapat diketahui jika setiap kenaikan pendapatan daerah ternyata tidak tidak diiringi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Selama tahun 2013 hingga tahun 2019, meski secara rata – rata terjadi perkembangan sebesar 7,09%, hanya secara tahunan terjadi penurunan.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di Kabupaten Jeneponto, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto?
3. Bagaimana pengaruh kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto?

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian yaitu kemandirian keuangan daerah, kemampuan keuangan daerah dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Jeneponto selama kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2019.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan realisasi laporan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto antara tahun 2000 – 2019. Sementara sampel merupakan bagian paling kecil dari laporan realisasi anggaran yaitu pendapatan asli daerah, total penerimaan daerah serta dana perimbangan, selain itu data yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi pada daerah yang sama dengan waktu tahun 2000 – 2019.

Model penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif serta regresi linier berganda. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan untuk melihat rasio kemampuan keuangan daerah serta rasio kemandirian keuangan daerah. Masing – masing dari rasio tersebut dapat diketahui dari rumus berikut :

a. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (Derajat Desentralisasi Fiskal)

Kriteria dalam mengetahui kemampuan daerah untuk mengatur serta mengurus pemerintah daerahnya dapat dilakukan dengan mengukur kemampuan daerah dalam bidang keuangan (Prakoso et al., 2019). DDF yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DDFi = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Pola Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (%)	Pola Hubungan
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Derajat Otonomi Fiskal)

Kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan tersebut pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD, seperti pajak daerah dan retribusi seras daerah lainnya dan daerah pembangunan yang hanya dapat direalisasikan jika disertai dengan independensi fiskal yang efektif (Qisthina et al., 2019). Rasio Kemandirian Keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$DOFi = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{dana perimbangan}} \times 100\%$$

Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Tabel 3. Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
0-25	Instruktif
>25-50	Konsultatif
>50-75	Partisipatif
>75-100	Delegatif

Model berikutnya yang digunakan yaitu regresi linier berganda yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi pada variabel Y apabila variabel X mengalami perubahan. Penggunaan analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini karena ada dua variabel X yaitu rasio kemandirian keuangan daerah (X1), rasio kemampuan keuangan daerah (X2) serta variabel pertumbuhan ekonomi (Y). persamaan regresi linier berganda dalam penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e_{it}$$

Dimana :
 Yit : Pertumbuhan Ekonomi
 X1 : Derajat Otonomi Fiskal
 X2 : Derajat Otonomi Fiskal
 Ei : Variabel pengganggu yang tidak dimasukkan dalam model
 A : Konstanta
 b1, b2 : Koefisien

Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan metode produksi atas dasar harga konstan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \frac{PDRB_{it} - PDRB_{it-1}}{PDRB_{it-1}} \times 100\%$$

Dimana :
 Yi : Pertumbuhan Ekonomi
 PDRB_{it} : Produk Domestik Regional Bruto tahun i
 PDRB_{it-1} : Produk Domestik Regional Bruto tahun i - 1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Analisis Simultan (Uji F)

Hasil regresi dari pengaruh kemandirian dan kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto selama rentang tahun 2000 –

2019 menggunakan taraf keyakinan 95% ($\alpha = 5\%$), dengan $df = 20$. Berdasarkan uji F, nilai F-Statistik sebesar 5,108 lebih besar dari nilai F kritis (F_{tabel}) pada $\alpha = 5\%$, $df = 20$ yaitu sebesar 3,55. Hal ini berarti seluruh variabel bebas yaitu kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam model mempengaruhi secara nyata terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi dengan tingkat keyakinan 95%. Signifikansi kedua variabel bebas tersebut dapat ditunjukkan pula oleh nilai $F = 0,018 < 0,05$ (nilai $\alpha = 5\%$).

Berdasarkan uji simultan, dapat diketahui bahwa kedua variabel bebas yaitu kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Uji Analisis Parsial (Uji t)

Uji t merupakan uji *statistic* yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat. Syarat untuk mengetahui variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dapat diketahui jika :

- Jika Prob. $> \alpha$ (5%), maka H_0 diterima;
- Jika Prob. $< \alpha$ (5%), maka tolak H_0 .

Tabel 4. Uji Analisis Parsial (Uji t)

Dependent Variabel: PE
 Method: Least Squares
 Date: 11/02/20 Time: 09:46
 Sample: 1 20
 Included observations: 20

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.058388	0.010094	5.784257	0.0000
DDF	-3.080437	1.221016	-2.522848	0.0219
DOF	2.471633	0.888904	2.780540	0.0128
R-squared	0.375406	Mean dependent var		0.054545
Adjusted R-squared	0.301925	S.D. dependent var		0.022286
S.E. of regression	0.018620	Akaike info criterion		-4.991691
Sum squared resid	0.005894	Schwarz criterion		-4.842331
Log likelihood	52.91691	Hannan-Quinn criter.		-4.962535
F-statistic	5.108850	Durbin-Watson stat		0.905690
Prob(F-statistic)	0.018305			

Sumber : Olah Data Eviews 10

Pembahasan

Dari hasil analisis Tabel 3, dapat diketahui nilai Prob. $< \alpha$ (5%), yang berarti variabel kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Dari tabel di atas, juga dapat diketahui persamaan regresi :

$$Y_{it} = 0,05 - 3,080X_1 + 2,471X_2$$

Hasil persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai $a = 0,058$ menunjukkan bahwa apabila kondisi kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah tidak mengalami perubahan atau tetap, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto meningkat 0,058.
2. Nilai X_1 sebesar $- 3,080$ menunjukkan setiap kenaikan rasio kemampuan keuangan daerah sebesar 1% maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,08% dengan asumsi variabel lain tetap, begitu sebaliknya.
3. Nilai X_2 sebesar 2,471 menunjukkan setiap kenaikan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 1% maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,47% dengan asumsi variabel lain tetap, begitu sebaliknya.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Hasil koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen secara statistik dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,375. Hal ini berarti 37,5% pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto dapat dijelaskan oleh variabel kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah, sementara 62,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model atau faktor – faktor diluar penelitian ini.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan daerah. Selama tahun 2000 – 2019 rasio kemandirian keuangan daerah masih berada pada tingkat rendah sekali (RS) karena berada pada rentang persentase 0% - 25% dengan pola hubungan instruktif.
2. Berdasarkan analisis rasio kemampuan keuangan daerah. Selama rentang tahun 2000 – 2019, rasio kemampuan keuangan daerah masih relatif kecil karena berada pada rentang 0% - 10% dan berada pada pola hubungan sangat kurang.
3. Kemampuan keuangan daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Jeneponto, dimana nilai probabilitas

kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar $0,02 < 0,05$.

4. Kemandirian keuangan daerah (X2) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Jeneponto, dimana nilai signifikansi kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar $0,01 < 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

- Fafurida, F., & Pratiwi, E. N. (2017). Financial independence of regencies and cities in Central Java. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 199–209. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art9>
- Gousario, F., & Dharmastuti, C. F. (2015). Regional Financial Performance and Human Development Index Based on Study In 20 Counties/Cities of Level I Region. *The Winners*, 16(2), 152. <https://doi.org/10.21512/tw.v16i2.1568>
- Nurhemi, & Suryani, G. (2015). Regional Financial Autonomy and the. *Bulletin of Monetary, Economics and Banking*, 18(October 2015), 171–192.
- Paul, J., Renyaan, A., Ubud, S., & Idrus, M. S. (2012). *Effect of Fiscal Autonomy and Economic Growth on Local Financial Performance (A Study on Local Government Of Papua Province)*. 1(1), 16–21.
- Prakoso, J. A., Islami, F. S., & Sugiharti, R. R. (2019). *Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah*. 4(1), 87–100.
- Qisthina, F. A., Khusaini, M., & Wahyudi, S. T. (2019). Analysis of Regional Financial Independence Towards Economic Growth and Human Development Index (Case Study: SWP Gerbangkertasusila Plus). *Analysis of Regional Financial Independence Towards (Qisthina, et Al.) Development*, 22(1), 47–51.
- Raza, H., Tinggi, S., Administrasi, I., & Meutia, R. (2018). Difference Analysis of the Autonomy of Extended Regencies in Aceh Province Indonesia Faisal Fahmi. *Emerald Reach Proceedings Series*, 1, 2516–2853. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00093>
- Royda, R., & Riana, D. (2019). Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(2), 50.

<https://doi.org/10.30630/jakmenpnp.14.2.174>

Saputra, B., Amzar, Y. V., & H.P, P. (2015). Analisis pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di provinsi jambi.

Ekonomi Regional, 10(2), 145–151.

Suwandi, & Warokka, A. (2013). Fiscal Decentralization and Special Local Autonomy: Evidence from an Emerging Market. *The Journal of Southeast Asian Research*, 2013, 1–14. <https://doi.org/10.5171/2013.554057>

Yushkov, A. (2016). Fiscal decentralization and regional economic growth : Theory , empirics , and the Russian experience . *Russian Journal of Economics*, 1(4), 404–418. <https://doi.org/10.1016/j.ruje.2016.02.004>